



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

IMPOR BERAS ANCAM PRODUKTIVITAS BERAS PETANI

Sri Nurhayati Qodriyatun

Analisis Legislatif Ahli Madya

sri.qodriyatun@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) secara matematis menegaskan bahwa produksi beras dalam negeri untuk tahun ini mencukupi, bahkan surplus. Diperkirakan produksi beras hingga akhir tahun 2022 mencapai 31,90 juta ton. Jika konsumsi beras nasional setiap bulannya stabil di angka 2,5 juta ton sepanjang tahun, maka produksi beras nasional masih surplus 1,7 juta ton karena angka konsumsi beras hanya sekitar 30,20 juta ton. Demikian perhitungan BPS didasarkan hasil pengamatan 6.000 petugas BPS yang disebar di 229 ribu lebih titik di seluruh Indonesia per Oktober 2022 dalam rangka Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2022.

Surplus produksi beras terjadi di beberapa wilayah di Indonesia seperti di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Selatan, Aceh, dan Nusa Tenggara Barat. Surplus terjadi pada bulan Maret, April, dan Juni 2022. Sementara, pada bulan Januari--Februari dan September--November terjadi defisit. Meskipun demikian, stok beras dinyatakan aman hingga akhir tahun ini di semua daerah. Daerah lumbung beras pun menurut Menteri Pertanian mengalami penambahan dari 9 provinsi kini menjadi 15 provinsi dari 34 provinsi. Di sisi lain, daerah sortir atau daerah merah sudah tidak banyak lagi, hanya beberapa daerah di Papua dan Riau. Sementara itu, daerah kuning, yakni daerah yang sudah bisa swasembada tetapi belum berkontribusi terhadap surplus beras, ada 10 sampai 11 daerah.

Keberhasilan Indonesia dalam mengatasi potensi krisis pangan global mendapat apresiasi dari FAO. Mengingat tidak mudah mengupayakan penyediaan pangan di tengah pandemi Covid-19 dan tantangan perubahan iklim. Bahkan, FAO menilai Indonesia sebagai negara yang sangat strategis dan memiliki peranan penting mengatasi krisis pangan global. FAO berencana meningkatkan kerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan produksi pangan sebagai upaya menyediakan stok pangan negara lain. Dalam kerja sama itu nantinya FAO akan memberikan pendampingan oleh para *expert* di FAO untuk meningkatkan produktivitas pangan Indonesia. Pendampingan ini juga dilakukan terhadap program pengembangan *food estate* yang dinilai telah mampu meningkatkan produktivitas hasil pertanian dalam dua tahun ini.

Posisi pemerintah Indonesia yang telah mampu mengatasi potensi krisis pangan global ini menunjukkan bahwa pemerintah dalam pandangan banyak pakar pertanian tidak perlu melakukan impor beras, terutama di kondisi surplus beras seperti saat ini. Namun, 14 Desember 2022 Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menggelar rapat koordinasi terkait perberasan nasional bersama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog, dan Badan Pangan Nasional. Disampaikan oleh KSP bahwa pemerintah telah menyiapkan 500 ribu ton beras komersial di luar negeri yang sewaktu-waktu dapat dibawa ke Indonesia. Beras komersial tersebut merupakan persediaan akhir tahun 2022 sampai menunggu panen raya pada Februari--Maret 2023 agar Bulog dapat menyerap hasil panen petani untuk mengisi ulang stoknya sampai dengan 1,2 juta ton. KSP pun memastikan bahwa beras komersial ini tidak akan mengganggu beras petani karena hanya dipergunakan untuk

kondisi tertentu, seperti untuk penanggulangan bencana, intervensi harga jika diperlukan, dan beberapa kegiatan pemerintah lainnya.

Meskipun impor beras dilakukan dalam rangka menjaga *floor price* di tingkat petani dan akan dikeluarkan pada saat produksi berkurang sebelum waktu panen raya datang, namun kebijakan impor beras ini menjadi satu ironi karena Indonesia pada 14 Agustus 2022 lalu telah mendapat penghargaan dari IRRI (International Rice Research Institute), yang merupakan lembaga riset dunia yang berkonsentrasi pada komoditas padi, atas keberhasilan Indonesia meningkatkan produksi padi hingga surplus. Data BPS pun menunjukkan bahwa sampai akhir tahun 2022 masih terdapat surplus beras sebesar 1,7 juta ton. Dalam beberapa kali pemerintah mengeluarkan keputusan melakukan impor beras seringkali merugikan petani. Evaluasi struktur harga beras dari hulu hingga hilir sangat diperlukan. Selain terus berupaya meningkatkan produktivitas beras melalui intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, maupun rehabilitasi lahan pertanian. Selama ini petani seringkali harus menanggung rugi ketika kebijakan impor dilakukan menyebabkan harga yang berlaku di pasar berada di bawah biaya pokok produksi. Kerugian ini dapat menggerus minat petani untuk menanam padi dan akan dapat berimbas pada turunnya produksi beras nasional.

Atensi DPR

DPR RI melalui Komisi IV telah memberikan perhatian lebih atas rencana impor beras oleh Bulog yang direncanakan pada akhir tahun 2022. Melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi IV sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian, Bulog, dan Badan Pangan Nasional untuk memastikan bahwa ketersediaan dan penyerapan pangan berjalan aman. Namun, upaya tersebut masih perlu ditambah dengan terus memantau dan memastikan bahwa hasil panen masyarakat pada masa panen tahun depan terserap Bulog dengan harga yang wajar. Artinya, seluruh biaya produksi plus keuntungan yang akan diterima petani diperhitungkan agar petani tidak merugi. Selain itu, juga memastikan bahwa ketersediaan pupuk dan obat-obatan hama dengan harga yang terjangkau sehingga produktivitas beras petani terus terjaga dan meningkat.

Sumber

dpr.go.id, 13 Desember 2022;
kompas.com, 14 Desember 2022;
kompas.id, 12 Desember 2022;
media Indonesia, 14 Desember 2022;
republika.co.id, 14 Desember 2022; dan
tempo.co.id, 14 Desember 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Sri. Nurhayati Q.
Dian Cahyaningrum
Nidya Waras Sayekti
Edmira Rivani
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.